

## Transformasi LPP TVRI di Tengah Pergolakan Politik dan Struktural

Retno Intani

Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2006-2011;  
Dosen di Universitas Moestopo

### Abstract

*TVRI still faces an identity crisis between representing the public interest with the interests of power. The influence of power remains strong even though TVRI has been established as public service broadcasting since 2002. This article tries to analyze the political and structural issues that interfere the transformation of TVRI as public service broadcasting. Various conflicts of interest, especially from the government and parliament eventually obstruct TVRI to act as a public broadcaster in the real sense.*

**Keywords:** *TVRI, public service broadcasting, political and structural agitation.*

### Abstrak

TVRI masih mengalami krisis identitas antara menjadi representasi publik atau melayani penguasa. Kekuasaan masih sangat berpengaruh pada lembaga ini meski TVRI telah ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) sejak tahun 2002. Artikel ini mencoba menganalisis isu-isu politik dan struktural yang menghambat transformasi TVRI menjadi LPP. Beberapa problem kepentingan terjadi, terutama dari pihak pemerintah dan DPR yang ternyata menghambat lajunya transformasi TVRI dalam proses menjadi badan penyiaran publik.

**Kata Kunci:** *TVRI, lembaga penyiaran publik, pergolakan dunia politik dan struktural*

### Pendahuluan

TVRI telah ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia, tapi hingga saat ini operasionalisasi penyelenggaraan LPP belum terlihat. Dalam kaitan ini, Ashadi Siregar (2001) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keberadaan media penyiaran publik di Indonesia, yaitu telekomunikasi sebagai basis material, orientasi fungsi publik sebagai basis kultural, sistem jaringan publik, adanya *code of conduct* profesi

dan institusi serta sistem kontrol fungsi publik. Basis kultural keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama yang menjadi dasar keberadaannya. Dalam konteks ini, kebersamaan sebagai nilai dasar ini dimulai dari ketentuan hukum, kebijakan negara, serta konsensus yang tumbuh di lingkungan masyarakat tentang orientasi dan fungsi sosial-kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik.